



ASOSIASI
BANK PEMBANGUNAN DAERAH

Menyelenggarakan :

DISKUSI PENCEGAHAN KORUPSI & IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BPDSI

Hyatt Regency - Yogyakarta | 11 Juni 2008



Diskusi Pencegahan Korupsi dan Implementasi GCG bagi BPD SI dengan menghadirkan pembicara Deputy KPK Ade Raharja, Hyatt Regency, Yogyakarta (11/6)

Bank Daerah Mengepung Kota

Upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja bank daerah. Membentuk strategic holding agar bisa bersaing dengan bank nasional. Bank daerah mendukung gerakan antikorupsi dalam bidang perbankan.



Deputi KPK & Penegakan Hukum, Ade Raharja.

Deklarasi Yogyakarta adalah anak tangga penting bagi era kerja sama bank pembangunan daerah (BPD) di masa-masa mendatang. Deklarasi yang dihasilkan oleh Rapat Koordinasi Direksi BPD seluruh Indonesia tersebut menghasilkan pernyataan dukungan dan komitmen segenap jajaran BPD terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Naskah Deklarasi Yogyakarta tersebut di tandatangani oleh 26 BPD se-Indonesia. Naskah tersebut lalu di serahkan ke KPK sebagai catatan komitmen BPD.

Namun deklarasi yang dihasilkan di gedung BPD DIY ini sejatinya tidak hanya berfokus pada komitmen antikorupsi. Namun, juga membahas strategi bisnis mutakhir, sejalan dengan konsep *strategic holding*. Dengan konsep itu, ke depan akan banyak program kerjasama strategis antarbank daerah. Beberapa program kerja yang menjadi prioritas utama tersebut di antaranya adalah pengembangan fitur-fitur BPD Net Online, Pembentukan Pusat Pelatihan, peningkatan kegiatan perdagangan antar pulau, pembiayaan kredit sindikasi antar-BPD, dan sosialisasi *strategic holding*

kepada *stakeholder*.

Komitmen itu nanti akan dituangkan dalam satu naskah kesepakatan bersama BPD seluruh Indonesia. Menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Winny E Hassan, *blue print* kerja sama tersebut sudah ada. Namun implementasinya masih memerlukan waktu. "Kami yakin program-program tersebut akan makin mempererat hubungan kerja sama bisnis dan memantapkan peran BPD di masing-masing daerah," kata Winny yang juga menjabat sebagai direktur utama Bank DKI tersebut.

Menurut dia, langkah fenomenal yang diambil di Yogyakarta bukan sekadar *action* sesaat, tetapi merupakan rangkaian panjang dari program kerja dari Asbanda. Sebelumnya, pada akhir Mei lalu, ada satu ketentuan dimana bank-bank wajib melaporkan hasil *self assessment good corporate governance*-nya. Lalu pada awal bulan ini Asbanda melakukan pertemuan dengan KPK di Kantor KPK Jl HR Rasuna Said, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan setelah acara Sosialisasi Bersama Bank Indonesia dan KPK kepada seluruh Perbankan. Winny menegaskan, langkah yang dilakukan BPD memerlukan totalitas agar upaya peningkatan mutu BPD tidak terkendala.

Direktur Utama Bank Jatim Muljanto menjelaskan bahwa dengan berbagai kerja sama yang telah digalang Asbanda ini sangat terasa dampaknya bagi perkembangan usaha BPD. "Tren bisnis BPD beberapa waktu terakhir ini naik" kata dia.

Menurut Muljanto, yang juga Sekjen Asbanda ini, total aset BPD SI per Maret tahun ini tumbuh 4,37% menjadi Rp 168,529 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 160,915 triliun. Kredit yang disalurkan juga tumbuh pesat hingga 27,56% dari Rp 58,816 triliun per Maret 2007 menjadi Rp 75,023 triliun di Maret 2008. Lalu prosentase kredit investasi mencapai 31,06%. Demikian pula dengan kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), yang tumbuh 4,56%. Angka DPK ini

tidak terlampau besar, namun dari unsur tabungan naik signifikan, dari Rp 19,805 triliun posisi Maret 2007 menjadi Rp 26,211 triliun di posisi Maret 2008 atau melonjak hingga 32,35%.

"Hal ini tak lain buah keseriusan kami yang terangkai lewat Asbanda" Muljanto menegaskan. "Apalagi hubungan kerja sama antar BPD melalui Asbanda sudah semakin solid,".

Deputi KPK Ade Raharja mendukung upaya BPD menerapkan *good corporate governance*. Dalam kesempatan rapat koordinasi di Yogyakarta tersebut, Ade Raharja mengungkapkan, bank-bank termasuk BPD sering dipakai sebagai kas korupsi pejabat.

Modus operandinya antara lain meminjam uang pada bank dan dana tersebut ditempatkan pada bank lain dalam bentuk giro. Lalu jasa gironya diambil untuk kepentingan pribadi. Modus lain misalnya pejabat membuka rekening pribadi untuk menyimpan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), yang jasa gironya tidak masuk kas daerah.

Modus lain, seperti di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, bunga jasa giro disisihkan 2% untuk kepala daerah. Menurut Ade, dana-dana tersebut mulai ditelisik serius oleh pihak KPK. Untuk itu, Ade meminta agar anggota Asbanda menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) rentang waktu tahun 2000-2008 mengenai dana-dana yang diberikan kepada penyelenggara negara. Antara lain jasa giro, bunga deposito, honorarium, *special rate*, *marketing fee*, dan lain-lain.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Siti Ch Fadrijah mendukung upaya itu. Menurut dia pencegahan gratifikasi dan tindak pidana korupsi (TPK) lainnya sangat membantu pencegahan penyimpangan pengelolaan APBD. ●